BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Normalisasi hubungan yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Kuba pada 17 Desember 2014 menjadi langkah besar bagi hubungan kedua negara. Namun meskipun upaya perbaikan hubungan tersebut telah berlangsung sejak akhir tahun 2014, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam implementasi normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Sikap non-kooperatif yang masih dijalankan oleh kedua negara berdiri sebagai tantangan dalam normalisasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan embargo Amerika Serikat telah menghalangi upaya dalam memaksimalkan jalannya normalisasi. Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba masih berlaku hingga dimulainya normalisasi akibat adanya undang-undang yang melegitimasi kebijakan tersebut, selain itu Kuba juga belum menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait kebijakan nasionalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab rumusan masalah yakni *bagaimana implementasi normalisasi hubungan Amerika Serikat-Kuba tahun 2014-2017?* Pertanyaan tersebut telah terjawab menggunakan salah satu model permainan dalam *Game Theory*, yakni konsep *Stag Hunt*. Dalam konsep *Stag Hunt* yang dijelaskan oleh Brian Skyrms, menggambarkan skenario perburuan rusa dan kelinci yang dilakukan

oleh dua orang. Untuk mendapatkan rusa tersebut, seluruh pemain harus bekerja sama *(cooperate)* karena tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan rusa apabila hanya dilakukan oleh satu pemain, sedangkan untuk menangkap kelinci dapat dilakukan oleh seorang pemain saja tanpa bantuan dari pemain lainnya *(defect)*. Namun perlu diingat bahwa, dari aspek apapun nilai mendapatkan rusa akan lebih baik dari pada hanya mendapatkan kelinci. Sehingga nilai maksimal dalam permainan *Stag Hunt* akan didapatkan apabila seluruh pemain memilih untuk bekerja sama *(cooperate, cooperate)*.

Dalam hubungan Amerika Serikat dan Kuba, telah dijelaskan bahwa kedua negara masih menjalankan sikap *defect* yang menghambat normalisasi. Embargo Amerika Serikat terhadap Kuba digolongkan sebagai sikap *defect* karena menghambat jalannya normalisasi hubungan, begitu juga dengan kebijakan nasionalisasi Kuba yang digolongkan sebagai bentuk *defect* karena menjadi hambatan bagi normalisasi.

Meskipun Presiden Barack Obama telah berulang kali menyerukan kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengakhiri embargo terhadap Kuba, namun kebijakan embargo tersebut hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan Kongres dengan mempertimbangkan undang-undang Amerika Serikat yang melegalkan kebijakan tersebut, sekaligus juga Kuba perlu untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam pencabutan embargo tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *Stag Hunt* dengan sikap *(defect, defect)* yang masih dijalankan oleh kedua negara, normalisasi hubungan yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Kuba belum dapat

dikatakan tercapai. Padahal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kedua negara harus bersama-sama menjalankan sikap kooperatif dalam hal ini dengan mengakhiri embargo Amerika Serikat terhadap Kuba serta menyelesaikan permasalahan nasionalisasi Kuba atas properti milik Amerika Serikat yang diambil alih pada masa pemerintahan Fidel Castro.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan dari kesimpulan diatas, penelitian ini secara spesifik hanya menjelaskan mengenai embargo Amerika Serikat dan nasionalisasi Kuba sebagai bentuk hambatan dari implementasi normalisasi hubungan yang dijalankan oleh kedua negara pada masa pemerintah Presiden Barack Obama dan Raúl Castro. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait bagaimana implementasi normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Kuba setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Raúl Castro. Mengingat bahwa Amerika Serikat saat ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan Kuba dipimpin oleh Presiden Miguel Diaz-Canel, pergantian kepemimpinan tersebut tentunya juga membawa perubahan terkait kebijakan normalisasi hubungan kedua negara.